

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014 – 2018

Eka Arif Rustanto ¹⁾

Y. Djoko Suseno ²⁾

Untung Sriwidodo ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Magister Manajemen, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ ekaarifrustanto@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to know (1) The financial performance of the Surakarta city government fiscal year period 2014 - 2018, (2) efficiency of the expenditure of Surakarta city government in the management of its resources year budget 2014 - 2018. The population in this research is the realization report of the Government of Surakarta. The samples studied were the realization report of the Government of Surakarta APBD year budget from 2014 to 2018. Sample editing using the Purposive sampling method. The source of the research data is secondary data. The data analysis techniques used are quantitative descriptive. The conclusion of the research: hypotheses that declare the financial performance of the Surakarta city government year period budget 2014 - 2018 views from (1) fiscal decentralization degree ratio is sufficient, is true, (2) PAD effectiveness ratio is effective, is true and (3) ratio effectiveness of PAD is effective, is true. Hypotheses that state Surakarta's government spending efficiency in its resource management year 2014 - 2018 budget is an efficient view of the (1) ineffective efficiency ratio, which is not true, (2) ineffective shopping efficiency ratio, So it is not true, (3) large operating spending ratio, so it is not true and (4) small capital expenditure ratio, so it is not true.

Keywords: financial ratios, regional financial performance, local government.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya Halim (2018: 230). Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan Mahmudi (2016: 55). Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis Laporan Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghitung kemampuan dan kinerja Pemerintah Daerah. Diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Desentralisasi, Rasio Efektivitas dan Efisiensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Keserasian Belanja, Rasio Ketergantungan Daerah, dan *Debt Service Ratio (DSR)*. Hasil dari perhitungan tersebut lalu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat di evaluasi kemampuan dan kinerja Pemerintah daerah.

Penelitian analisis kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah banyak diteliti di daerah-daerah lainnya contohnya penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Astuti (2015:10) bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola keuangan daerahnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran, namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat kinerja Pemerintah daerah masih cukup rendah yang artinya pemerintah daerah tersebut masih butuh proses dalam meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan pengamatan Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola keuangan daerahnya selalu mendapatkan hasil wajar tanpa pengecualian dari Badan pemeriksa keuangan selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak 2010. Hal ini menunjukkan dalam pemeriksaan laporan keuangan daerahnya tidak diketemukan hal hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun perlu diketahui apakah kinerja keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang baik, sehingga perlu adanya penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan adanya *research gap* di penelitian-penelitian sebelumnya di mana terdapat hasil yang berbeda beda antara daerah satu dengan lainnya.

Tujuan penelitian yang diharapkan peneliti adalah: 1) untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta periode tahun anggaran 2014 - 2018. 2) untuk menganalisis efisiensi laporan belanja Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan sumber dayanya tahun anggaran 2014 - 2018.

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur manajemen keuangan, dan dapat digunakan peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Kota Surakarta didalam menganalisis Kinerja

Keuangan guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Fahmi (2011: 2), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kluvers (2010), akuntabilitas merupakan suatu bentuk kegiatan dalam hal pengungkapan serta pertanggungjawaban laporan keuangan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di Indonesia laporan pertanggungjawaban disajikan dalam bentuk laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ada juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan oleh pemerintah tingkat kabupaten sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan kepada pemerintah pusat, masyarakat, dan kreditor. Berdasarkan laporan APBN/APBD tersebut, pihak parlemen, investor, kreditor, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dapat dengan mudah menilai kinerja pemerintah tersebut.

Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya Halim (2018: 231).

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Tabel 1. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

No	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal %	Kemampuan Keuangan Daerah
1.	00,00 – 10,00	Sangat Kurang
2.	10,01 – 20,00	Kurang
3.	20,01 – 30,00	Cukup
4.	30,01 – 40,00	Sedang
5.	40,01 – 50,00	Baik
6.	> 50,00	Sangat baik

Sumber: Tim peneliti Fisipol UGM bekerja sama dengan Litbang Depdagri

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus Mahmudi (2019: 140) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100 \%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2018: 169).

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas PAD

No	Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
1.	100% keatas	Sangat Efektif
2.	100%	Efektif
3.	90%-99%	Cukup Efektif
4.	75%-89%	Kurang Efektif
5.	Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019: 141)

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input* Mahmudi (2019: 164).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2019: 19), adalah:

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efisien;
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang;
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efisien.

5. Rasio Keserasian

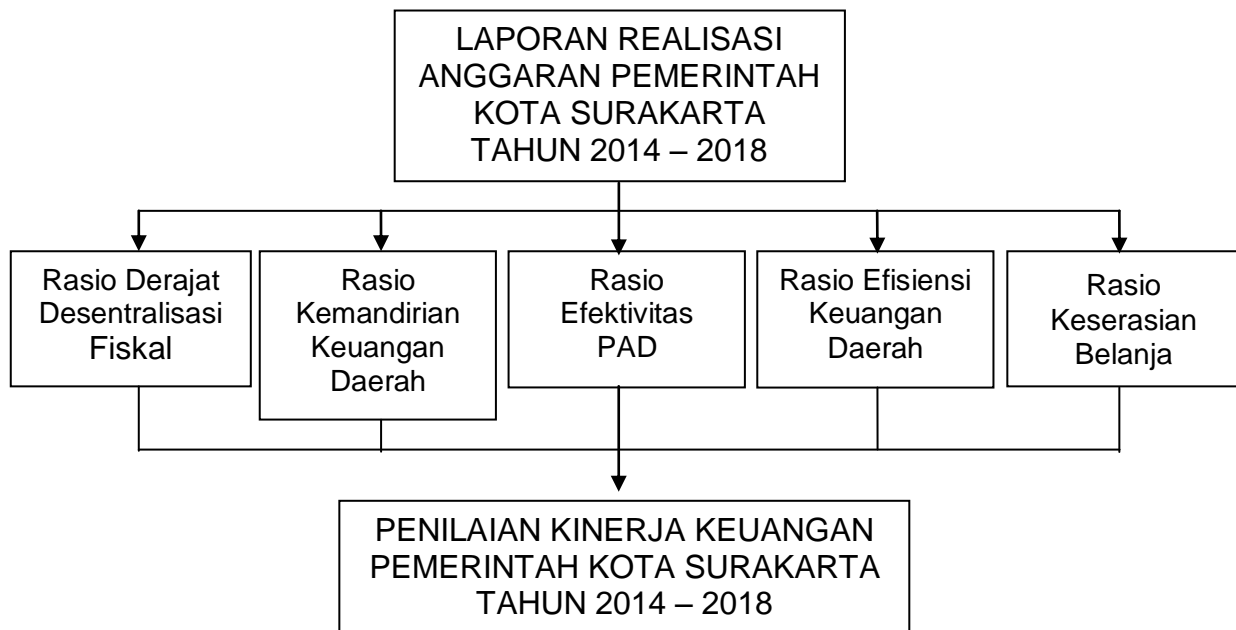
Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kajian pustaka, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut Putra (2018: 48).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2012) menyatakan bahwa kinerja keuangan pada aspek kemandirian dan aspek keserasian masih kurang. Terbukti untuk rasio kemandirian masih rendah, rasio belanja rutin besar dan rasio belanja modal rendah, sedangkan untuk kinerja keuangan ditinjau dari aspek pengelolaan pendapatan asli daerahnya sudah sangat efektif dan efisien berdasar uraian di atas, maka hipotesis 1 dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta periode tahun anggaran 2014 – 2018 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah cukup, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rendah dan Rasio Efektivitas PAD adalah efektif.

2. Efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*) Putra (2018: 63). Penelitian Pramono (2012), menyatakan kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta untuk aspek pengelolaan belanja tingkat efisien sudah baik. kemudian Natalia, *et al.* (2015), menyatakan menyatakan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sleman untuk aspek dalam efisiensi belanja cukup efisien. berdasar uraian di atas, maka hipotesis 2 dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Efisiensi belanja Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan sumber dayanya tahun anggaran 2014 – 2018 dilihat dari rasio efisiensi daerah dan rasio keserasian adalah efisien.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

1. Jenis data dan Sumber data

- a. Jenis data menggunakan data kualitatif berupa data keterangan, penjelasan dari sumber buku, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan serta data kuantitatif berupa laporan keuangan daerah tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2018.
- b. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder berupa data laporan realisasi APBD tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2018. Sumber sekunder lainnya diperoleh melalui literatur, buku, dan jurnal yang digunakan untuk mendukung penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dan studi lapangan.

Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Surakarta. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018. Prosedur Penentuan Sampel menggunakan metode purposive sampling, karena penelitian ini membahas tentang kinerja keuangan daerah maka kriteria sampel dalam penelitian ini adalah hasil dari laporan realisasi keuangan daerah kota Surakarta tahun anggaran 2014 - 2018. Penentuan jumlah sampel penelitian ini adalah dengan pertimbangan sesuai dengan kemampuan peneliti.

Teknik Analisis data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan secara deskriptif, di mana bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian Belanja.

ANALISIS DATA

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan Kota Surakarta dalam bidang keuangan dalam kurun waktu 2014 - 2018. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta, Berikut hasil dari analisis rasio:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 4. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (RP)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	Skala Interval
2014	335.660.206.641	1.525.575.850.953	22%	Cukup
2015	372.798.426.790	1.568.482.686.616	24%	Cukup
2016	425.502.779.064	1.703.003.847.995	25%	Cukup
2017	527.544.224.971	1.803.920.801.908	29%	Cukup
2018	527.739.388.159	1.879.056.016.679	28%	Cukup

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta.

Dilihat dari tabel 4 rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah Kota Surakarta tergolong cukup namun meningkat tiap tahunnya, dari tahun 2014 dengan rasio 22%, kemudian naik sebesar 2% pada tahun 2015 dengan rasio 24% dan naik pada tahun 2016 dengan rasio 25% lalu naik lagi pada tahun 2017 dengan rasio 29% dan turun 1% pada tahun 2018 dengan rasio 28%. Dari keterangan di atas di mana hasil analisis data rasio derajat desentralisasi adalah cukup.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2014	797.295.017.689	335.660.206.641	42%	Konsultatif
2015	755.728.419.465	372.798.426.790	49%	Konsultatif
2016	1.103.859.741.264	425.502.779.064	39%	Konsultatif
2017	1.273.667.576.937	527.544.224.971	41%	Konsultatif
2018	1.090.922.293.666	527.739.388.159	48%	Konsultatif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan tabel 5 di atas Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami peningkatan dalam Tahun 2014 - 2015 dengan Rasio 42% dan 49% lalu menurun pada Tahun 2016 dengan Rasio 39% dan naik lagi pada Tahun 2017 - 2018 dengan Rasio 41% dan 48%. Dari keterangan di atas di mana hasil analisis data rasio kemandirian keuangan daerah adalah konsultatif.

3. Rasio Efektivitas PAD

Tabel 6. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas PAD	Pola Hubungan
2014	335.660.206.641	318.814.097.000	105%	Sangat Efektif
2015	372.798.426.790	361.019.672.000	103%	Sangat Efektif
2016	425.502.779.064	394.200.858.000	108%	Sangat Efektif
2017	527.544.224.971	492.503.909.101	107%	Sangat Efektif
2018	527.739.388.159	505.328.290.741	104%	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan tabel 6 di atas tingkat efektivitas PAD selalu di atas 100% hal ini menandakan kemampuan Pemerintah Kota Surakarta dalam menghimpun dana PAD sangat efektif. kemudian dapat dijabarkan kenaikan dan penurunan rasio efektivitas PAD yang berawal dari Tahun 2014 dengan Rasio 105% menurun pada Tahun 2015 dengan Rasio 103% naik pada Tahun 2016 dengan Rasio 108% lalu menurun pada Tahun 2017 dengan Rasio 107% dan menurun lagi pada Tahun 2018 dengan Rasio 104%. Dari keterangan di atas di mana hasil analisis data rasio efektifitas PAD adalah sangat efektif.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

a. Rasio Efisiensi

Tabel 7. Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	Pola Hubungan
2014	1.479.827.902.467	1.525.575.850.953	97,0%	Tidak Efisien
2015	1.532.527.097.064	1.568.482.686.616	97,7%	Tidak Efisien
2016	1.680.456.921.161	1.703.003.847.995	98,7%	Tidak Efisien
2017	1.767.486.061.945	1.803.920.801.908	98,0%	Tidak Efisien
2018	1.914.818.594.396	1.879.056.016.679	101,9%	Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan tabel 7 di atas tingkat efisiensi perbandingan antara belanja daerah dan pendapatan daerah selalu pada tingkat tidak efisien hanya pada tahun 2018 saja yang menyatakan efisien. Rasio efisiensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut terjadi kenaikan pada tiga Tahun pertama yaitu tahun 2014 – 2016 dengan Rasio 97%, 97,7% dan 98,7%. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,7% dengan angka 98% dan naik lagi pada Tahun 2018 menjadi 101,9%. Hasil analisis data rasio efisiensi adalah mayoritas tidak efisien.

b. Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah

Tabel 8. Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	Pola Hubungan
2014	1.479.827.902.467	1.672.569.745.211	88,5%	Tidak Efisien
2015	1.532.527.097.064	1.781.680.904.270	86,0%	Tidak Efisien
2016	1.680.456.921.161	2.033.031.082.604	82,7%	Tidak Efisien
2017	1.767.486.061.945	1.987.655.027.756	88,9%	Tidak Efisien
2018	1.914.818.594.396	2.091.964.585.155	91,5%	Tidak Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan tabel 8 di atas Rasio Efisiensi Belanja di atas pada tiga Tahun pertama mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 - 2016 sebesar 85,5%, 86% dan 82,7% hal ini menandakan belanja Pemerintah Kota Surakarta tidak efisien. Pada tahun 2017 dan 2018 naik menjadi 88,9% dan 91,5% walaupun masih pada tingkat yang sama yaitu tidak efisien, namun mengalami perbaikan kinerja.

Bahwa antara perencanaan yang dituangkan dalam anggaran kemudian dibandingkan dengan realisasinya apabila tidak mencapai rasio 100%, maka selain disimpulkan tidak efisien belanja keuangan daerah tersebut juga dikatakan perencanaan anggarannya masih belum baik. Dari keterangan di atas di mana hasil analisis data rasio efisiensi belanja adalah tidak efektif.

5. Rasio Keserasian Belanja

a. Rasio belanja operasi

Tabel 9. Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi
2014	1.192.605.898.429	1.479.827.902.467	81%
2015	1.295.744.514.170	1.532.527.097.064	85%
2016	1.372.170.358.617	1.680.456.921.161	82%
2017	1.297.764.875.842	1.767.486.061.945	73%
2018	1.388.167.753.119	1.914.818.594.396	72%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan tabel 9 di atas rasio belanja operasi pada tahun 2014 dengan rasio 81% naik menjadi 85% pada tahun 2015 dan turun menjadi 82% pada tahun 2016, lalu turun lagi sebesar 73% pada tahun 2017 dan mengalami penurunan lagi dengan hasil rasio 72% pada Tahun 2018. Belanja Operasi bisa dikatakan belanja jangka pendek atau merupakan belanja habis pakai dalam satu tahun. Semakin persentasenya turun maka semakin baik pula kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Sehingga dapat disampaikan bahwa hipotesis yang menyatakan efisiensi belanja Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan sumber dayanya tahun anggaran 2014 - 2018 adalah efisien dilihat dari rasio belanja operasi, tidak terbukti dikarenakan rasio belanja operasi masih besar.

b. Rasio Belanja Modal

Tabel 10. Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal
2014	286.491.756.994	1.479.827.902.467	19%
2015	235.829.590.702	1.532.527.097.064	15%
2016	307.534.354.570	1.680.456.921.161	18%
2017	469.587.240.639	1.767.486.061.945	27%
2018	523.770.318.153	1.914.818.594.396	27%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan tabel 10 di atas Rasio belanja modal pada Tahun 2014 dengan Rasio 19% turun menjadi 15% pada Tahun 2015 lalu naik menjadi 18% pada Tahun 2016 dan naik pesat menjadi 27% pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan Rasio 27%. Rasio belanja modal di atas menjelaskan bahwa bagian belanja modal untuk setiap tahunnya meningkat (kecuali tahun 2015) hal ini menunjukkan belanja untuk

sarana prasarana diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surakarta, sehingga aset Pemerintah Kota Surakarta tentunya juga meningkat hal ini tentunya mendukung pelayanan publik yang semakin baik.

PEMBAHASAN

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta periode tahun anggaran 2014 – 2018.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta periode tahun anggaran 2014 – 2018 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal setiap tahunnya adalah cukup. Tingkat desentralisasi yang semakin baik akan membuat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah semakin baik dan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dapat dikurangi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta setiap tahunnya adalah pada derajat konsultatif. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berarti semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan Daerah Mahmudi (2019: 140).

Kemudian untuk Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Surakarta setiap tahunnya adalah pada tingkat sangat efektif. Analisis data menunjukkan hasil penelitian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta periode tahun anggaran 2014 - 2018 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah cukup, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rendah dan Rasio Efektivitas PAD adalah efektif, sehingga hipotesis terbukti.

2. Efisiensi belanja Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan sumber dayanya tahun anggaran 2014 - 2018.

Efisiensi merupakan hal penting dari bagian *value for money* efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. semakin besar output dibanding nput, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Hasil analisis dari rasio efisiensi menunjukkan selama kurun waktu 4 (empat) tahun 2014 sampai dengan 2017 menunjukkan tidak efisien, namun tahun 2018 terdapat peningkatan kinerja sehingga rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisien. Selanjutnya hasil analisa menurut rasio efisiensi belanja menunjukkan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah tidak efisien. Walaupun selama 5 (lima) tahun masih pada tingkat yang sama yaitu tidak efisein, namun rasio efisiensi belanja Pemerintah Kota Surakarta mengalami perbaikan kinerja.

Anggaran merupakan alat perencanaan organisasi dalam bentuk keuangan untuk periode tertentu. Anggaran sebagai alat perencanaan berisi estimasi pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan selama periode anggaran. Anggaran juga berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan organisasi beserta kebutuhan dana yang diperlukan dan target kinerja yang hendak dicapai. Kecermatan, ketelitian, kelengkapan dan ketetapan dalam perencanaan anggaran sangat penting untuk mencapai keberhasilan organisasi. Sebaliknya kelemahan dalam perencanaan anggaran dapat menimbulkan masalah tahap pelaksanaan yang selanjutnya dapat mengakibatkan kegagalan organisasi mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan target yang ditetapkan Mahmudi (2016: 64). Rasio efisiensi belanja yang rasionya selama 5 (lima) tahun dibawah 100% hal ini menunjukkan antara perencanaan yang dituangkan dalam anggaran kemudian dibandingkan dengan realisasinya apabila tidak mencapai rasio 100%, maka selain disimpulkan tidak efisein belanja keuangan daerah tersebut juga dikatakan perencanaan anggarannya masih belum baik.

Dari hasil penelitian selama 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan rasio belanja operasi persentasenya masih besar dan rasio belanja modal masih kecil. Rasio Belanja Operasi menunjukkan seberapa banyak porsi belanja yang dialokasikan dalam bentuk belanja operasi. Belanja Operasi bisa dikatakan belanja jangka pendek atau merupakan belanja habis pakai dalam satu tahun. Semakin persentasenya turun maka semakin baik pula kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Dari hasil penelitian dapat disampaikan jika belanja operasi menunjukkan porsinya semakin menurun, hal ini menunjukkan perkembangan positif untuk kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta.

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Rasio belanja modal sesuai hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa bagian belanja modal untuk setiap tahunnya meningkat (kecuali tahun 2015) hal ini menunjukkan belanja untuk sarana prasarana dan pembangunan diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surakarta, sehingga aset Pemerintah Kota Surakarta tentunya juga meningkat hal ini tentunya mendukung pelayanan publik yang semakin baik. Analisis data menunjukkan hasil penelitian Efisiensi belanja Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan sumber dayanya tahun anggaran 2014 – 2018 adalah efisien, sehingga hipotesis tidak terbukti hal ini semakin didukung dengan hasil analisis data bahwa rasio belanja operasi yang masih besar dan hasil rasio belanja modal yang masih kecil.

KESIMPULAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta periode tahun anggaran 2014 – 2018 berdasarkan rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kota Surakarta tergolong rendah dan masuk kriteria 'cukup' yang artinya Keuangan Pemerintah Kota Surakarta cukup mampu dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan memiliki pola hubungan konsultatif yang artinya peranan pemerintah dalam Pendapatan Daerah mulai berkurang dan dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi fiskal. Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD menunjukkan rasio efektivitas dari tahun 2014 – 2018 sudah melebihi 100% yang artinya kinerja pemerintah sudah sangat efektif.

Efisiensi belanja Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan sumber dayanya tahun anggaran 2014 – 2018 berdasarkan Rasio efisiensi pada tahun 2014 sampai dengan 2017 masuk dalam kategori tidak efisien karena rasio efisiensi berada dibawah 100%. Pada tahun 2018 rasio efisiensi memperoleh hasil efisien, hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Surakarta kinerjanya meningkat karena berhasil meningkatkan tingkat efisiensi. Berdasarkan Rasio efisiensi belanja pada tahun 2014 sampai dengan 2018 masuk dalam kategori tidak efisien karena rasio efisiensi berada dibawah 100%. Walaupun masih pada tingkat yang sama yaitu tidak efisien selama 5 tahun, namun kinerja efisiensi selalu meningkat setiap tahun, hal ini menunjukkan efisiensi mengalami perbaikan kinerja. Kemudian angka dibawah 100% tersebut apabila dikaitkan dengan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran kemudian dibandingkan dengan realisasinya apabila tidak mencapai rasio 100%, maka selain disimpulkan tidak efisien belanja keuangan daerah tersebut juga dikatakan perencanaan anggarannya masih belum baik. Berdasarkan rasio belanja operasi dapat disimpulkan belanja operasi untuk membiayai kegiatan non-fisik lebih banyak dibandingkan belanja modal karena semua Rasio yang dihasilkan di atas 50% dari belanja daerah. Belanja Operasi bisa dikatakan belanja jangka pendek atau merupakan belanja habis pakai dalam satu tahun, semakin persentasenya turun maka

semakin baik pula kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Dengan demikian kinerja pemerintah daerah dalam mengelola belanja operasi perlu diperbaiki. Berdasarkan rasio belanja modal bisa dijelaskan bahwa bagian belanja modal untuk setiap tahunnya meningkat (kecuali tahun 2015) hal ini menunjukkan belanja untuk sarana prasarana diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surakarta, sehingga aset Pemerintah Kota Surakarta tentunya juga meningkat hal ini tentunya mendukung pelayanan publik yang semakin baik, namun persentase rasio antara 15% sampai dengan 27% menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan analisis realisasi APBD Tahun Anggaran 2012*.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, Misbah dan Yenti Nurhidayat. 2017. "Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota". Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan *The Ford Foundation* (FF).
- Jusmawati, 2011. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan asli daerah". *Tesis*, Makasar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Khairudin dan Aminah. 2017. "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 -2014". *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 8, No. 2, September 2017: 23 - 37.
- Kluvers, Ron. 2010. "Mechanism of Accountability I Local Government. *International Journal of Business and Management*", 5(7): h: 50 - 58.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Firma, Heribertus. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, Mohammad. 2019. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Banten: Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhibtari, Astriana Nabila. 2014. "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 - 2012". *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Natalia dan Astuti. 2015. "Analisis Laporan Keuangan dalam mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman". *Jurnal Sosio-Humaniora* Vol. 6 No. 1 Mei 2015.
- Natalia dan Astuti. 2015. "Analisis Laporan Keuangan dalam mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman". *Jurnal Sosio-Humaniora* Vol. 6 No. 1 Mei 2015.
- Nurlaela, Siti dan Rahmawati. 2010. "Pengaruh Faktor Keprilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosuko Wonosraten". *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Poyoh, Murni, dan Tulung. 2017. "Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon". *Jurnal EMBA* Vol. 5 No. 2 Juni 2017, Hal. 745 - 752.
- Pramono, Joko. 2014. "Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)". *Jurnal, Among Makarti*, Vol.7 No. 13, Juli 2014.
- Purwadinata, Subhan. 2012. "Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah". *Tesis*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Putra, Windhu. 2018, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, Depok: Rajawali pers.
- Rahmawati dan Putra. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010 - 2012". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 15. No. 3. Juni (2016): 1767 - 1795.
- Rainer Pangalila, Mario. 2012. "Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP Dan Disclaimer yang Ada di Sulut". *Tesis*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Sesotyaningsih, Mirna. 2012. "Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmentak, Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, dan Rr. Suparntiningrum. 2015. "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Semarang tahun 2009-2013)". *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen*.Vol. 30 No. 1 Hal. 085 - 1442.
- Susilowati, Suharno, dan Kristiano. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013 - 2015". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 No. 2 Hal. 229 - 237.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Widada, Sri. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten". *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wijaya, Agung. 2011. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta Dilihat dari Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009 - 2010". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wonda, Welio. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua". *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No. 3, September 2016, Hal. 192 - 200.